

ABSTRAK

Alijawati. A : Penerapan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Terlambat Mendaftarkan Pkerjanya Kepada BPJS Ketenagakerjaan Dhubungkan Dengan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Kasus Pada Perusahaan Di Rancaekek)

Penelitian ini bermula pada saat penulis melihat fenomena tentang maraknya kasus ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia khususnya yang dialami oleh serikat buruh maupun pekerja perusahaan. Ketidaksesuaian antara hak yang diperoleh pekerja dengan kewajiban yang harus mereka jalankan merupakan satu hal yang tidak bisa ditolerir karena menyangkut proporsionalitas hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan teori hukum keadilan dan teori hukum kesejahteraan. Selain itu permasalahan lainnya adalah mereka tidak bisa merasakan manfaat dari program jaminan sosial akibat dari ketidakpatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pkerjanya sebagai peserta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, mengetahui hambatan suatu perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja terkait pemberian jaminan sosial serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan jika terindikasi akan mendapat sanksi administratif oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Metode penelitian ini menggunakan Deskriptif Analitis dengan tujuan memberikan gambaran sistematis berupa pengolahan data dan menganalisis jawaban dari hasil observasi, studi wawancara serta penelitian di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci dan PT. X Rancaekek. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yakni menguji dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap perusahaan yang terlambat mendaftarkan pkerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan sejumlah Instansi yang berwenang dalam mengatasi perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian pkerjanya adalah dengan menerapkan sanksi administratif berupa SP I dan SP II, namun jika dianggap masih lalai maka BPJS Ketenagakerjaan meminta bantuan KEJARI, WASNAKER dan KPKNL dalam menindak dan mendisiplinkan perusahaan. Adapun hambatan yang dialami perusahaan adalah dimana pada saat ingin didaftarkan NIK pada E-KTP nya tidak valid dan hal tersebut tentunya memakan waktu karena harus diurus terlebih dulu di kantor Disdukcapil dari domisili masing-masing pekerja. Di sisi lain, pihak BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik, tidak mau menerima data yang tidak benar atau kurang akurat, maka penulis merasa jika perusahaan ingin lebih meminimalisir permasalahan pekerja telat terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tentunya dengan mencocokkan terlebih dulu data pekerja pada saat awal mendaftarkan diri untuk bekerja di perusahaan tersebut dengan identitas diri pekerja terhadap E-KTP nya saat itu.

ABSTRACT

Alijawati. A : The Application of Law against Company which Was Late in Registering Its Employee to BPJS of Employment Linked to Article 17 Paragraph (1) of Law Number 24 Year 2011 about Administering Agency of Social Security (Case Study at Company in Rancaekek)

This research began when the author saw the phenomenon about the rampant of employment cases occurred in Indonesia, especially experienced either labor unions or company workers. The incompatibility between the right of workers and the obligation they had to run was one thing that couldn't be tolerated because it involved the proportionality of the rights and duties of the parties in accordance with the justice and prosperous theory. Furthermore, another problem faced by workers was they couldn't gain the benefits of social security programs caused by the disobedience of companies in registering their employees as participants to BPJS.

This study aimed to determine the implementation of Law conducted by BPJS of Employment, to determine the obstacles of company in fulfilling the right of workers related to the provision of social security and to determine the way of companies in dealing with administrative sanction given by the Administering Agency of Social Security of Employment.

This research used analytical descriptive method in order to give systematic description such as data processing and to analyze the result of the observation, interview study and the research in BPJS of employment, section Bandung Suci and PT. X Rancaekek. Besides, the approach method in this research used juridical normative in order to examine and to analyze the regulation of Law related to law application against company that was late in registering its employee to BPJS of employment, as stated in Law Number 24 Year 2011 about the Administering Agency of Social Security.

The result showed that the implementation of Law which conducted by BPJS of Employment and a number of authorized institute in dealing with company that only registered some of its employees was to apply administrative sanctions such as SP I and SP II, but if considered still being imprudent the BPJS of Employment needed to report to the three institutions namely KEJARI, WASNAKER and KPKNL in cracking down and disciplining the companies. Moreover, the obstacles faced by the company like the process in registering of NIK in E-KTP were invalid and it could be wasting time because it must be administered first in Disdukcapil office from the domicile of each employee. In other hand, the BPJS of Employment as public Law did not want to receive incorrect and less accurate data. So, the authors thought that if the company willing to minimize the problem of late-registered employee in BPJS of Employment, it had to match first the data of the employee in signing up to work in the company with the employee's identity against his current E-KTP.